

## **Dari Modernisme Islam ke Islamisme: Transformasi Ideologi dan Gerakan Islam di Aceh**

**M. Alkaf\***

*Institut Agama Islam Negeri Langsa, Indonesia*  
[alkaf@iainlangsa.ac.id](mailto:alkaf@iainlangsa.ac.id)

**Noorsafuan Che Noh**

*Universiti Sultan Zainal Abidin, Malaysia*  
[noorsafuancn@unisza.edu.my](mailto:noorsafuancn@unisza.edu.my)

**Saiful Hakam**

*Pusat Riset Kewilayahan BRIN, Indonesia*  
[hakam9@gmail.com](mailto:hakam9@gmail.com)


**Muhammad Said**

*Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Kamal, Indonesia*  
[saidmoch1987@gmail.com](mailto:saidmoch1987@gmail.com)

**Khairul Fahmi**

*STIT Al-Hilal Sigli, Indonesia*  
[khairulfahmi815@gmail.com](mailto:khairulfahmi815@gmail.com)

*\*Corresponding Author*

 <https://doi.org/10.32505/lentera.v7i1.10990>

Submitted: February 24, 2023

Accepted: August 20, 2023

Published: August 22, 2023

### **Abstract**

This study examines how Islamic modernism in Aceh evolved into Islamism, based on evidence from historical records. The author argues that Islamic modernism played a key role in shaping the rise of Islamism in Aceh. To support this, the study breaks the development into three key periods. The first period focuses on the spread of Islamic modernist ideas through the madrasa network. The second period explores how these ideas interacted with the growing sense of Indonesian nationalism. The third period examines how Islamist ideas became more established, particularly with the introduction of local democracy after the peace agreement that ended the conflict. This study employs a qualitative methodology with a historical approach, with data collected through literature review and archival document analysis. The study concludes that Islamic modernism was important in forming Islamist ideology in Aceh. The study concludes that Islamic modernism was important in forming Islamist ideology in Aceh. Unlike other studies that link Islamic modernism with support for democracy, this research shows that in Aceh, the shift from Islamic modernism to Islamism has led to a more skeptical attitude toward modern concepts like human rights and democracy. This study offers a

nuanced perspective on the ideological trajectory of Islamic thought in Aceh by challenging the dominant narrative that Islamic modernism is inherently aligned with democratic values. Through a periodized analysis and a focus on Aceh's unique political history, the study enriches our understanding of the complex relationship between religion, nationalism, and democratization in Muslim-majority regions.

**Keywords:** Islam Modernism, Islamism, Islamic Law, Aceh Conflict

### **Abstrak**

Studi ini membahas transformasi modernisme Islam ke Islamisme di Aceh. Berdasarkan data empiris dari dokumentasi, penulis berargumen bahwa gagasan modernisme Islam menjadi pembentuk ideologi Islamisme di Aceh. Untuk mempertahankan argumen tersebut, penulis membahas tiga periode sejarah yang menjelaskan awal mula pertumbuhan gagasan modernisme Islam sampai bertransformasi menjadi Islamisme di Aceh. Pertama, periode pembentukan gagasan melalui transmisi ide modernisme Islam melalui jaringan madrasah. Kedua, periode pencarian makna melalui perjumpaan ide Islamisme yang sudah terbentuk dengan gagasan nasionalisme Indonesia yang sedang mekar. Ketiga, periode penemuan formasi dan kontinuitas dan praktik Islamisme melalui pembentukan demokrasi lokal sejak masa perdamaian dari konflik bersenjata. Studi ini menggunakan metodologi kualitatif dengan pendekatan historis, dengan data dikumpulkan melalui studi literatur dan analisis dokumen arsip. Studi ini menyimpulkan bahwa ide modernisme Islam menjadi faktor penting pembentukan ideologi Islamisme di Aceh. Selain itu, tidak seperti studi serupa lainnya yang menempatkan modernisme Islam sebagai faktor pertumbuhan masyarakat muslim yang compatible dengan demokrasi, studi di atas menunjukkan bahwa transformasi modernisme Islam ke Islamisme di Aceh lebih cenderung menciptakan masyarakat yang skeptis terhadap ide-ide kemoderenan seperti Hak Asasi Manusia dan demokrasi. Studi ini menawarkan perspektif yang bernuansa terhadap trajektori ideologis pemikiran Islam di Aceh dengan menantang narasi dominan yang menganggap bahwa modernisme Islam secara inheren sejalan dengan nilai-nilai demokrasi. Melalui analisis yang dibagi dalam beberapa periode dan fokus pada sejarah politik Aceh yang unik, studi ini memperkaya pemahaman kita tentang hubungan yang kompleks antara agama, nasionalisme, dan demokratisasi di wilayah mayoritas Muslim.

**Kata Kunci:** Islam Modernis, Islamisme, Hukum Islam, Konflik Aceh

### **Pendahuluan**

Islam di Aceh bukan hanya sekedar agama tapi juga sebuah diskursus yang terus-menerus diperdebatkan, ditafsirkan, dan diinstitutionalkan. Karena itu, Islam di Aceh jika boleh diibaratkan seperti mata air zam-zam, yang terus-menerus mengeluarkan air pengetahuan sekaligus kontradiksi yang dinamis. Julukan lawas yang dulu sangat masyhur, yakni Aceh adalah Serambi Mekkah. Namun, julukan ini telah dilupakan sama sekali terutama anak-anak yang lahir tahun 2000-an. Perkembangan cepat teknologi transportasi, orang-orang tidak lagi naik bahtera untuk melawat ke mancanegara tapi naik kapal terbang. Padahal, di masa lampau, ketika orang pergi ke manca negara masih menggunakan bahtera. Aceh Serambi Mekah

adalah hal yang nyata. Bahkan ini menjadi penanda utama yang orang Aceh sangat banggakan. Bahwa orang-orang Indonesia ketika akan melakukan lawatan sakral, menunaikan rukun Islam, kelima, ibadah haji ke Mekkah, mau tidak mau, bahtera yang mereka naiki harus singgah, barang sebentar, di Aceh, sebelum melanjutkan pelayaran samudera ke jazirah arab (Putuhena, 2012). Kajian ini mendiskusikan tentang bagaimana Islam di Aceh menjadi pintu gerbang sekaligus wahana bagi bangsa Atjeh menuju modernitas, menuju nasionalisme Indonesia sekaligus etno-nasionalisme Aceh, dan kemudian Islamisme.

Dalam hal modernitas, dua dekade sebelum robohnya Pemerintahan Hindia Belanda, dan datangnya bala tentara Jepang, golongan ulama, disebut Teungku, menyambut dengan sangat antusias gagasan Pembaharuan Islam (Aspinall, 2009; Morris, 1983; Reid, 1979). Datangnya era modern, sains dan teknologi baru tidak menyebabkan hilangnya Islam di Aceh tapi sebaliknya memompa semangat baru yang menyala-nyala pada Islam. Islam dijadikan alat penerang bagi orang-orang Aceh dalam menjadi manusia modern. Islam Pembaharuan di Aceh berkaitan erat dengan lembaga pendidikan baru madrasah, yang di dalamnya para murid dan guru fasih menggunakan pena, menulis dan membaca buku tentang Islam maupun pengetahuan Barat seperti geografi, ilmu alam, aljabar, dan olahraga. Orang-orang tidak menolak kehadiran surat kabar, telegraf, radio, dan bahkan tidak mempermasalahkan hukum halal dan haram pada busana barat terutama dasi dan jas. Puncaknya, para ulama di Aceh bersatu padu dan berhasil mendirikan organisasi modern bernama Persatuan Ulama Seluruh Aceh, sering disingkat menjadi PUSA. Organisasi ini mewarnai perpolitikan Aceh dengan Islam sebagai wahana sekaligus ideologi kokoh. Bahkan, organisasi ini berhasil menempatkan ulama, para Teungku, sebagai elit baru yang modern yang berlekas cepat dalam menyambut perubahan politik dunia. Robohnya kekuasaan penjajah Belanda di Aceh, dan kedatangan Tentara Jepang, yang disambut antusias para ulama. Pada masa pendudukan Jepang inilah, para ulama mendapatkan kekuasaan politik yang cukup signifikan, yang akan dibahas di bawah ini.

Selanjutnya, Islam diajukan sebagai alasan ideologis oleh para ulama modern itu, untuk Aceh bergabung dengan Indonesia (Aspinall, 2009; Morris, 1983; Reid, 1979). Jika ditinjau secara lebih mendalam, Aceh bukan sekedar bergabung dengan Republik Indonesia tapi lebih dari itu memberikan sumbangan sangat besar bagi pendirian dan pembentukan republik muda, sampai-sampai menjadi hal yang mustahil dalam mendiskusikan sejarah republik tanpa kehadiran orang-orang Aceh. Hal yang sangat menarik, Islam menjadi sesuatu yang krusial dalam mendiskusikan hubungan Aceh dan Indonesia. Para ulama yang masa itu merupakan kaum elit di Aceh punya niat kuat membela Indonesia karena Indonesia merupakan negara baru beriman kepada Allah. Negara yang punya asas Ketuhanan. Selanjutnya, para ulama mencita-citakan Aceh menjadi sebuah negeri Islam, di bawah naungan negara Indonesia yang berketuhanan.

Di masa perjuangan, revolusi, 1945-1949, Aceh tidak tergoda untuk bergabung dengan negara Sumatra Timur bentukan Belanda, tetap loyal pada Republik. Ia bahkan menjadi benteng kokoh Republik di ujung Sumatra, yang kaya raya, berkat hubungan bisnis dengan protektorat Inggris semenanjung Malaya dan Singapura (Reid, 1979). Orang Aceh memainkan peran kunci dalam konsolidasi Republik (Bertrand, 2012). Aceh menjadi Daerah Modal, yang menyumbangkan emas untuk pembelian kapal terbang bagi revolusi Indonesia (Reid, 1979). Daerah Islam yang kaya raya di ujung pulau Sumatra, di bawah pimpinan Ulama Modern. Namun, Ulama Aceh mendapat balasan pengkhianatan oleh kaum republik yang berpusat di Jakarta (Bertrand, 2012; Sjamsuddin, 1990).

Negara baru Indonesia ternyata tidak berbentuk negara Islam, apalagi Republik Islam, melainkan berasas sekuler yang religius, mengakui adanya iman pada Tuhan tapi tidak meresmikan Islam sebagai dasar negara, sebaliknya memberikan ruang dan jaminan bagi agama-agama lain untuk berdiri sejajar sebagai penyangga republik (Bertrand, 2012; Sjamsuddin, 1990). Selain itu, elit Aceh, para ulama ini, juga kurang mendapatkan apresiasi, wadah, dan tempat di dalam kepengurusan partai-partai Islam organisasi sosial keagamaan Islam di tingkat nasional, bahkan di Kementerian Agama (Bertrand, 2012). Rasa kecewa ini kemudian menyadarkan ulama Aceh untuk fokus ke dalam, dengan lebih merekatkan kembali Islam ke dalam jati diri bangsa Aceh. Islam-Aceh berhadapan, vis-à-vis, dengan Jakarta, dan tidak segan-segan menyebut Sukarno sebagai pengkhianat. Elit Jawa yang dulu menjanjikan bahwa Aceh akan menjadi negeri Islam di bawah republik, dan menjanjikan Islam sebagai bagian dari Kebangsaan baru, tapi ternyata tidak.

Para ulama kemudian menghadapi kenyataan pahit, ketika pengganti Suharto, menempatkan para teknokrat sebagai elit baru di Aceh. Rasa pahit makin dirasakan ketika Suharto menjalankan pembangunan secara represif di Aceh, sehingga mendorong orang-orang Aceh menggelorakan spirit perlawanan dengan mendukung partai Islam PPP dalam pemilihan umum di tingkat nasional (Haris, 1991). Islam makin menjadi jati diri baru yang kokoh bagi bangsa Aceh di era represif Orde Baru. Dengan diperlihatkan fakta politik, PPP selalu menang dalam setiap pemilihan umum (Haris, 1991). Dalam hal jati diri, Islam di Aceh dilembagakan setelah selama hampir lima dasawarasa menjadi bahan perdebatan alot dalam relasinya dengan pemerintah pusat. Syariat Islam mendapatkan pengesahan secara legal dan diterapkan di Aceh meskipun masih dalam batas-batas tertentu. Syariat Islam diterapkan dan ditegakkan pada beberapa aspek dalam hukum pidana, moralitas, dan aspek-aspek ekonomi, yang dibahas lebih mendalam dalam artikel ini.

Penelitian ini bersifat kualitatif, dengan pendekatan historis. Prosedur pengolahan data melalui mekanisme reduksi, display, dan verifikasi data (Miles & Huberman, 1994). Data primer diperoleh dari studi kepustakaan. Data yang dibutuhkan terdiri periode pembentukan, periode pencarian

makna, dan periode penemuan formasi dan kontinuitas dari pertumbuhan Islamisme dan modernism Islam di Aceh. Data yang terkumpul direduksi menjadi rangkuman berdasarkan tema dan narasi dari teks/informan/responden. Artikel ini berisi data dari kutipan isi buku dan narasi tematik hasil reduksi data. Data tersebut kemudian dianalisis melalui tiga tahap: Pertama, data disajikan kembali terutama melalui analisis isi untuk menjaga kedalamannya. Kedua, teknik deskriptif digunakan untuk menunjukkan pola dan tren data yang berasal dari buku-buku teks. Ketiga, penerjemah digunakan untuk menarik makna eksplisit dan implisit. Keseluruhan data dibaca dalam kerangka kerja kontekstual untuk menganalisis signifikansi data yang diperoleh

### **Islamisme dan modernism Islam di Aceh: Pembentukan formasi awal**

Perjalanan dari Mekkah ke Aceh, Teungku Chiek Pante Kulu menulis satu syair tentang bagaimana orang Aceh hidup, serta bagaimana orang Aceh harusnya mati. Syair itu dinamakan Hikayat Prang Sabi. Satu hikayat, yang menurut Ali Hasjmy menjadi alasan orang Aceh sanggup berperang melawan Belanda dengan sangat lama (Hasjmy, 1977). Hikayat Prang Sabi merupakan kreasi dari Tgk. Chiek Pante Kulu yang memadukan konstruksi perlawanan orang Aceh dengan mencarinya dalam tafsir Quran yang dituangkan dalam medium hikayat (Fadhli et al., 2024). Pada awalnya, perang ini bersifat sekular, tanpa sentimen agama (Hasbi, 2024), namun hikayat Prang Sabi membawa ulama Aceh memasuki wilayah yang sebelumnya dikuasai oleh sultan, uleebalang, dan orang kaya: wilayah politik. Sebelumnya, ulama hanya menjadi panasehat agama bagi Sultan, terutama yang berkaitan dengan ajaran-ajaran agama, seperti fiqih, teologi, dan tasawuf (Daudy, 2002; Miswari, 2018b). Apalagi, dalam struktur sosial masyarakat Aceh di awal abad ke-19 sampai ke ke-20, ulama merupakan bagian dari susunan struktur politik uleebalang, baik dalam bentuk Sagi dan Mukim.

Dengan berada dalam struktur sosial demikian, ulama menghabiskan banyak waktunya untuk memberi Keputusan agama di wilayah non politik dan ekonomi – yang memang merupakan wewenang uleebalang. Ulama berperan untuk memberikan pendapat agama mengenai hal-hal perdata, seperti nikah, waris, dan talaq, maka posisi ulama di Aceh – sebelum keterlibatan ulama dalam perang Aceh – berada di wilayah agama *an sich*. Keadaan berubah setelah sultan dan uleebalang kewalahan menghadapi invasi Belanda. Beberapa uleebalang di Aceh besar memutuskan untuk berpihak kepada Belanda sehingga meninggalkan sultan dan para orang dekatnya yang sedang berhadap-hadapan dengan Belanda (Morris, 1985). Keadaan tersebut akhirnya memanggil agama, melalui keterlibatan agensi ulama, untuk memenangkan perang sehingga narasi perang sabil akhirnya menjadi varian dalam perang panjang melawan Belanda itu.

Keberadaan ulama dalam perang, diwakili oleh sosok ulama Tiro dan keluarganya (Tiro, 1972), membuat narasi Aceh sebagai daerah yang fanatik berkembang dari wilayah Hindia Belanda sampai ke Eropa. Padahal sebelumnya, kemenangan Aceh melawan Belanda pada invasi pertama 26

maret 1873 dilihat oleh publik Eropa dan Amerika sebagai kemenangan sebuah kerajaan di wilayah bawah angin, bukan kemenangan daerah yang fanatik dengan agama. Bahkan, jika ditarik lebih jauh, Aceh yang pernah berkembang pesat di abad ke-16 karena memiliki bangunan agama yang terbuka yang berbasis pada Wadatul Wujud (Miswari, 2022). Atas alasan itu pula, Aceh menjadi wilayah perniagaan yang memastikan kapal pengangkut bahan rempah dan lainnya dapat hilir mudik ke Bandar.

Keadaan demikian berbalik ketika perang melanda Aceh, keterlibatan ulama yang begitu jauh akhirnya pula membawa Belanda harus menangani Aceh tidak dengan operasi militer belaka, tetapi juga dengan melibatkan ahli seperti Snouck Hurgronje untuk menyelidiki posisi agama dan ulama dalam konstruksi sosial masyarakat Aceh (Doel, 2023). Operasi militer Belanda untuk mengalahkan Aceh relative berhasil sejak abad ke-20. Beberapa pemimpin politik, perang, dan agama berhasil ditakukkan, di antaranya Sultan Aceh Muhammad Daudsyah yang memutuskan menghentikan perlawanannya, lalu memilih menyerah kepada Belanda (Stolwijk, 2021); Cut Nyak Dhien ditangkap dan dibuang ke Sumedang (Ibrahim, 1996); Tgk. Chiek di Tiro dan keturunannya tewas dalam peperangan (Ali et al., 2008).

Situasi Aceh yang relatif stabil pada awal abad ke-20 memungkinkannya adanya pembangunan fisik, seperti perkebunan (Umar, 2015) dan jalur transportasi (Sufi, 2001). Namun, di balik gegap gempita pembangunan Hindia Belanda di Aceh, ingatan sebagai wilayah yang dikalahkan tidaklah lekang, kekalahan menghadirkan perasaan malu (Reid, 2011). Selain itu, ada perasaan frustasinya rakyat Aceh semakin membuncah dengan adanya eksploitasi ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda. Permasalahan yang timbul adalah eksploitasi dan terhambatnya akselerasi politik kaum pribumi di awal abad ke-20. Hal itu, dalam konteks nasional dan global, disadari oleh kelompok intelektual yang kemudian membuat pergerakan politik, di antaranya atas nama Perhimpunan Indonesia di Belanda dengan memproduksi pemikiran kemajuan, seperti nasionalisme, swadaya, non kooperasi, dan persatuan nasional (Ingleson, 2018). Dalam konteks masyarakat Aceh, upaya untuk dari generasi intelegensia di masa awal dengan mencoba menyerap modernitas barat melalui semangat pembaharuan Islam (Abdullah, 1996).

Pembaharuan Islam yang berkembang di Aceh itu merupakan dampak besar dari ide-ide yang dikembangkan oleh Muhammad Abduh, Jamaluddin Al Afgani, Muhammad bin Abdul Wahab, dan Rasyid Ridha di belahan lain dari dunia Islam. Produksi ide pembaharuan itu dilakukan melalui media penerbitan majalah dan jurnal ilmiah yang diseludupkan salah satunya oleh para haji dan koresponden yang berdiam di Singapura (Azra, 2002). Salah satu yang kemudian menjadi tokoh sentral penerimaan pembaharuan Islam adalah Ayahanda Ibrahim di Aceh besar dan Teungku Daud Berueueh di Pidie (Remantan, 1984). Dua tokoh ini merupakan prototipe alim agama yang tumbuh dalam tradisi Islam rural, lalu menerima modernisasi atau pembaharuan Islam melalui instrumen madrasah. Melalui pembaharuan itu

pulahlah, imajinasi Aceh pascaperang kolonial disusun ulang dengan membawa agama sebagai unsur terpenting dalam penataan masyarakat Aceh baru. Keberadaan generasi baru keulamaan dan cendekiawan dari proses pembaharuan Islam ini lalu terkonsolidasi melalui semaraknya persemaian madrasah dan pendirian Persatuan Ulama Seluruh Aceh (Ibrahimi, 1982). Madrasah yang lahir di Aceh hasil dari persentuhan dari generasi baru Aceh setelah penaklukan daerah ini oleh Belanda (Hasjmy, 1984).

Pengambil alihan ide kemoderenan melalui gerakan pembaruan Islam pada dunia pendidikan. Aceh misalnya, telah mengirim ribuan pemudanya untuk belajar. Sebuah persaksian yang diceritakan oleh Ali Hasjmy ketika mereka disambut Mahmud Yunus (Hasjmy, 1984). “Dahulu, kami yang datang ke Aceh untuk belajar. Kini, berbondong-bondong pemuda Aceh datang ke daerah kami untuk belajar. Begitulah Allah memperlakukan kekuasaannya.” Sumatra Barat saat itu menjadi tempat perkecambahan ide-ide Islam yang berkemajuan (Noer, 1980). Pandangan muslim reformis saat itu menjadi penting dalam melihat relasi internal dan eksternal muslim Indonesia saat itu. Seperti yang dikatakan oleh Taufik Abdullah, bahwa dalam perkecambahan pemikiran muslim modernis, sekolah di Sumatra Barat menjadi tempat pertumbuhan perlawanan kepada kekuasaan kolonial (Abdullah, 2018). Begitu juga yang dialami oleh para pemuda Aceh yang berada di Sumatra Barat (Hussain, 1990). Di wilayah itu, pelajar Aceh tidak hanya belajar ilmu agama dan ilmu dunia, tetapi juga mengadakan perkumpulan untuk memupuk semangat perlawanan terhadap Belanda, yang telah dijadikan sebagai musuh sejak mereka lahir melalui pembentukan realitas baru atas nama Islam melalui keberadaan para ulama (Ibrahimi, 1982). Formasi demikian dapat dipahami karena semenjak perubahan struktur kekuasaan di Aceh, pascakemenangan Belanda dalam perang, Aceh telah menempatkan kelompok ulama, yang sebelumnya berada dalam internal kekuasaan Aceh, menjadi aktor yang di luar struktur kolonial (Morris, 1985). Bahkan dalam titik tertentu menjadi kelompok yang tidak berhasil termodernkan seperti kelompok bangsawan.

### **Pencarian Makna Identitas Islam Aceh**

Controller Belanda merasa jengkel dengan penolakan Teuku Nyak Arif agar bahasa Aceh menjadi bahasa resmi dalam pembelajaran di sekolah. “Biarkan bahasa Aceh hidup di kampung-kampung, sedangkan kami menggunakan bahasa Indonesia agar terhubung dengan saudara-saudara kami di bagian Indonesia lainnya,” jawab T. Nyak Arif (Velve, 1987). Seperti tesisnya Anderson (2016), keterhubungan yang disampaikan oleh Teuku Nyak Arif merupakan sebuah pembayangan akan komunitas baru. Ada titik singgung karena kedekatan secara kebudayaan, juga pembayangan akan nasib yang sama, sebagai bangsa yang masih terjajah. Perasaan demikian lalu dirumuskan dengan semakin tumbuhnya kelas terpelajar di Indonesia. Pertumbuhan kelas terpelajar tersebut membuat warga pribumi melakukan pembaca ulang terhadap dirinya dan dunia yang melingkupi dirinya. Bahwa ada kesadaran tentang penjajahan dari bangsa lain terhadap diri mereka

sehingga muncul ide untuk merdeka, bukan sebagai daerah, melainkan oleh paham kebangsaan. Oleh karena itu, karena semakin terpelajar, warga pribumi menggunakan perspektif modern untuk dijadikan alat perlawanan. Perspektif modern itu diambil dari berbagai ideologi, baik Islam, sosialisme, komunisme, dan juga nasionalisme (Sukarno, 2016).

Empat varian ideologi itu, terutama Islam, sosialisme, dan komunisme, merupakan pisau analisis untuk memahami lapisan kelas dalam struktur kolonial, sedangkan nasionalisme merupakan tempat perjumpaan segala varian ideologi tersebut. Sedikit intelektual dan aktivis kemerdekaan yang berkeinginan mengumpulkan varian ideologi itu dalam satu gerak bersama, di antaranya adalah Ir. Sukarno. Sejak tahun 1920-an, dia menulis beragam studi yang membayangkan bahwa berbagai varian ideologi dapat hidup bersama untuk mencapai cita-cita Indonesia merdeka. Cita-cita itu, setelah dua dekade dia perjuangkan, menjadi landasan *philosophische grondslag* Indonesia merdeka, dengan apa yang disebutnya sebagai Pancasila (Latif, 2019).

Dalam konteks yang lebih lokal, ekspresi Islam politik semakin menguat dengan pertumbuhan intelektual dan ulama muda yang kemudian membangun berbagai organisasi, salah satunya Persatuan Ulama Seluruh Aceh (Santa, 2000). Organisasi ini merupakan pengejawantahan dari mobilisasi vertikal elit baru keagamaan di Aceh yang menggunakan spirit modernisme Islam. PUSA lalu melakukan perubahan kebudayaan orang Aceh untuk lebih modern, melalui madrasah yang dibentuknya (Latif, 1992). Pembentukan PUSA sekaligus pembentukan *Islamized* Aceh (Ali, 1994). Sebuah pembayangan Islam yang berbasis keAcehan dengan sentiment Aceh yang kuat. Fachry Ali menyebut, salah satu, ekspresi dari *Islamized* adalah puisi Ali Hasjmy yang dipersembahkan untuk Sukarno di periode awal revolusi nasional. Puisi demikian, seperti mewakili orientasi baru keIslaman dan keIndonesiaan Aceh saat itu.

Keberpihakan Aceh kepada Indonesia didasari oleh keyakinan bahwa bersama Indonesia, Aceh dapat menjalankan hukum Islam seperti yang dipraktikkan di zaman Iskandar muda. Zaman Iskandar muda adalah contoh terbaik bagaimana orang Aceh hidup sebagai bangsa yang terhormat. Alasan itu nantinya yang disampaikan oleh Daud Beureueh kepada Boyd Compton menjelang pemberontakan Darul Islam (Compton, 1992). Atas alasan imajinasi Islam dan masa lalunya itu, Daud Beureueh memarahi seorang aktivis muda kemerdekaan yang bertanya mengapa dia menolak ajakan Tengku Mansur untuk mendirikan negara Sumatra (TAbdullah, 1996). Alasannya yang dikemukakan kepada aktivis muda itu adalah Indonesia mengagumkan karena meletakkan Tuhan pada prinsip utamanya kenegaraannya. Prinsip ketuhanan itu yang diyakini oleh Daud Beureueh akan menjadi modal untuk Aceh hidup dalam balutan Islam. Keyakinan itu ditagihnya kepada Sukarno agar nanti, saat kemerdekaan diraih penuh, Aceh dapat menjalankan hukum Tuhan. Permintaan yang diamini oleh Sukarno. Atas kesepakatan itu, Daud Beureueh memimpin Aceh untuk memastikan proklamasi kemerdekaan Indonesia dapat dipertahankan.



Keadaan menjadi berbalik saat perundingan pada Konferensi Meja Bundar menghasilkan kesepakatan dengan pembentukan Republik Indonesia Serikat. Konsekuensinya, ada perampangan struktur pemerintah daerah sehingga Aceh, yang beberapa bulan sebelumnya sudah menjadi provinsi yang otonom, dilebur menjadi bagian administrasi provinsi Sumatra Utara. Peleburan itu, dalam kacamata elite politik nasional, dipandang sebagai kebutuhan administrasi belaka, tetapi tidak bagi orang Aceh. Peleburan provinsi Aceh dianggap sebagai pengkhianatan oleh Pemerintah Pusat atas jasa-jasa dan pengorbanan yang telah orang Aceh berikan selama masa revolusi nasional. Argumen dan sentimen demikian bahkan, kelak, dalam perundingan antara Dewan Revolusi Darul Islam Aceh dengan Pemerinth Pusat yang diwakili oleh Mr. Hardi, disampaikan dengan lugas oleh Ayah Gani.(Gani, 1959; Ganie, 2021).

Pembubaran dan peleburan ke provinsi Sumatra utara menimbulkan kegemparan. Secara umum, ada dua kontroversi politik yang terjadi di Aceh pada saat itu. pertama di kalangan yang zuama, frasa yang datang dari Nazaruddin Sjamsuddin <sup>(1990)</sup>, yang kehilangan pengaruhnya karena pos-pos sekular telah diisi dari tenaga luar. Bahkan beberapa tokoh-tokoh sipil dan militer dipindah tugaskan dari Aceh ke tempat baru (Saleh, 1992). Pada awalnya, golongan ulama tidak begitu terdampak dari Keputusan politik itu karena karakter keulamaan di Aceh berada dalam basis pedesaan sehingga secara simbolik, ketika Daud Beureueh menolak jabatan di Jakarta, bersamaan dengan keputusannya kembali ke kampung halamannya. Di kampung halamannya itu, dia berada bersama masyarakat yang memujanya. Lalu, sebagai seorang ulama, dia membangun kembali jiwa dan raga masyarakat, mulai dari membuat irigasi untuk pengairan pesawahan di Kabupaten Pidie, Aceh, juga membangun sebuah masjid yang kini dikenal dengan namanya.

“Kami ingin kembali seperti zaman Iskandar Muda,” kata Daud Beureueh kepada Compton. Compton, dari jauh, mendengar kalau Aceh telah mulai gusar karena peleburan wilayahnya ke Sumatra Utara (Compton, 1992). Kegusaran yang berujung pada pemberontakan bersenjata. Daud Beureueh akhirnya memilih memimpin rakyatnya menuntut apa yang sudah menjadi keinginan Aceh sejak lama: hidup bermartabat dengan agama dan budayanya. Pemberontak yang dipimpin oleh Daud Beureueh menimbulkan perasaan ironi, karena delapan tahun sebelumnya, dia menjadi orang terdepan yang membela Indonesia yang baru saja lahir. “Pemberontakan Kaum Republik,” kata Nazaruddin Sjamsuddin. Lalu, September 1953, meletuslah perlawanan terhadap Jakarta dari Aceh. dengan suara parau dan tegas, Darul Islam Aceh menyampaikan manifesto politiknya; alasan politik, budaya, dan etik mengapa pemberontakan bersenjata harus dilakukan terhadap negara yang ikut mereka dirikan (Feith & Castles, 1988).

Pemberontakan atas nama bendera Darul Islam berlangsung selama sembilan tahun. Pemberontakan bersenjata itu akhirnya berhasil mengembalikan provinsi Aceh. Lalu, diadakanlah perundingan demi perundingan untuk mendapatkan jalan keluar terbaik dan bermartabat dari

konflik bersenjata itu. Jalan keluarnya adalah Aceh dikabulkan tuntutananya, walaupun tidak sepenuhnya diberikan dengan komprehensif, terutama ketika terjadi perubahan konstalasi kepemimpinan nasional, dari Sukarno ke Suharto. Keengganan pemerintah pusat untuk mengabulkan tawaran perda Aceh tentang unsur-unsur pokok syariat menimbulkan kegusaran berikutnya. Namun, di saat yang sama, Muzakkir Walad mengambil Keputusan untuk menghentikan obsesi orang di Aceh untuk formalisasi hukum Islam. Keputusan yang harus diambilnya mengingat rezim Orde Baru memiliki perasaan traumatik dengan ide-ide Islamisme setelah tentara -yang menjadi tulang punggung Orde Baru—berperang dengan pemberontak atas nama Darul Islam. Lalu, kemudian hari, untuk mengalihkan energi besar itu, maka prncarian makna tentang Aceh diperluas oleh kerja-kerja kebudayaan yang didorong oleh LAKA (Hasjmy, 1995)

### **Penemuan formasi dan kontinuitas**

Sepanjang Orde Baru, Aceh melakukan pembacaan ulang identitas dirinya melalui dua hal, Islam politik dan islamisasi budaya. Dalam Islam politik, ada dua bentuk yang ditampilkan, mendukung Partai Persatuan Pembangunan dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Dua bentuk dukungan itu sekaligus pembeda dengan arus utama politik nasional yang didominasi oleh Golkar. Pembeda tersebut selalu berasal dari ideologi. Kepada PPP, ideologi yang ditunjukkan adalah Islam politik. Islam politik di Aceh selalu berasal dari akar yang lama, yaitu imajinasi untuk mendirikan negara Islam. Keinginan untuk mendirikan negara Islam bagi orang Aceh, jika tidak untuk Indonesia secara keseluruhan, seperti cita-cita Persatuan Ulama Seluruh Aceh, formalisasi hukum Islam itu cukuplah untuk Aceh saja. Keinginan yang begitu kuat ini sehingga mengabaikan tawaran material untuk dapat hidup sebagai daerah yang maju dengan melabuhkan pilihan kepada Golkar. Situasi demikian selalu menjadi dilema bagi elite Aceh untuk menjelaskan hal tersebut kepada Pemerintah Pusat saat itu yang tidak mentolerir konservatisme atas nama Islam.

Salah satu orang yang paling hendak menunjukkan bahwa Aceh bukanlah wilayah konservatif adalah Ali Hasjmy. Dia berusaha menampilkan wajah Aceh yang dapat bertemu dengan kepentingan nasional, terutama di masa Orde Baru, yang mengedepankan agenda pembangunan. Kesaksian itu disaksikan oleh Daoed Joesoef <sup>(2006)</sup>, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Kabinet Pembangunan III, ketika upaya pendirian Fakultas Kedokteran di universitas Syiah Kuala. Terjadi polemik mengenai keabsahan agama untuk dilakukan otopsi mayat manusia dalam rangka pembelajaran di ilmu kedokteran. Daoed Joesoef mengatakan izin pendirian Fakultas kedokteran di universitas Syiah Kuala hanya akan diberikan kalau ada fatwa dari ulama Aceh untuk pelaksanaan otopsi mayat tersebut. Di tangan Ali Hasjmy, yang saat itu sebagai ketua MUI, fatwa tersebut dikeluarkan. Upaya Ali Hasjmy untuk menjadikan wajah Aceh lebih ramah terhadap dunia luar ditunjukkan dengan membangun tradisi diskursus kebudayaan. Melalui dua lembaga yang

dipimpinnya, MUI dan LAKA, Ali Hasjmy mendorong seminar kebudayaan yang bertujuan untuk mencari asal usul dan formasi kebudayaan Aceh.

Namun demikian, distingsi politik Aceh tetaplah kuat. PPP masih menjadi identitas pembeda antara Aceh dengan nasional. kemenangan demi kemenangan PPP telah menunjukkan orientasi Islam politik yang kuat di wilayah itu (2019; Alkaf, 2024). Dominasi PPP akhirnya dapat diakhiri dengan operasi politik Orde Baru di Aceh pada Pemilu 1987 (Hasan, 2003). Tetapi, yang menjadi catatan kritisnya adalah orientasi orang Aceh terhadap Islam politik tidak serta merta diwujudkan dengan hanya memilih PPP, melainkan juga terendap dalam ingatan kolektif yang dipupuk oleh patriotism dari masa lalu, sebagaimana yang dibentuk dalam penulisan sejarah Aceh (Alfian & Basri, 1990; Aspinall, 2007; Feener, 2012; Hasjmy, 1977). Dengan kondisi demikian, maka upaya untuk membumikan Islam formal di Aceh tidak pernah berhenti. Apalagi, dari pinggiran dan hutan Aceh, Hasan Tiro menggelorakan pemberontakan terhadap Pemerintah Pusat yang didukung oleh Daud Beureuh (Saleh, 1992). Pemberontakan tersebut muncul karena didasari ketidakpuasan terhadap pembangunan yang timpang, sentiment etnisitas, dan kesadaran sejarah (Ali et al., 2008; Aspinall, 2009; Missbach, 2012; Schulze, 2004).

Pemberontakan bersenjata ini berlangsung tiga dekade. Beberapa studi meyakini bahwa pemberontakan Hasan Tiro berbeda dengan gerakan Daud Beureuh sebelumnya yang memperjuangkan negara Islam. Padahal tidak demikian. Hasan Tiro selalu meyakini bahwa masa depan politik Aceh adalah sebagai sebuah entitas Islam. Lebih lanjut, bagi Hasan Tiro, gerakan politiknya adalah untuk memisahkan diri dengan Indonesia, negara yang tidak memiliki ikatan apapun dengan Aceh (Damanik, 2010; Patria, 2008; Tiro, 1986; Tiro, 1968). Secara politik, tujuan dari gerakan Hasan Tiro tidak berhasil, tetapi secara kebudayaan, pemikirannya telah ikut mengubah cara pandang orang Aceh tentang dirinya dan dunia luarnya (Alkaf, 2023a). Hasan Tiro telah melakukan pembentukan ide nasionalisme keAcehan (Irwan, 2015; Ishaq, 2013), tetapi di saat bersamaan, gagasan Islamisme telah terlebih dahulu disemai, yang mengakibatkan terjadinya kontestasi gagasan pascakonflik (Alkaf, Abdullah, Qodir, & Jubba, 2021; M Alkaf, 2019; Miswari, 2018a).

Kemenangan Islamisme dalam pembentukan identitas Aceh pascakonflik tidaklah mengejutkan jika dibaca dengan pendekatan genealogis (Alkaf, Abdullah, Qodir, & Jubba, 2022). Secara genealogis, ingatan tentang penyatuan negara dan agama di Aceh lebih awal kemunculannya daripada gagasan etnonasionalisme (Abubakar, 2005). Atas alasan itu, di tengah konflik bersenjata untuk melepaskan Aceh dari Indonesia, tawaran untuk formalisasi syariat Islam disambut secara luas di Aceh (Tempo.co, 2003). Dalam pandangan elite GAM, tawaran formalisasi syariat Islam selalu dilihat sebagai kompensasi untuk menghentikan perlawanan mereka (DetikNews, 2006). Walaupun demikian, dalam proses pembentukan demokrasi lokal di Aceh (Alkaf & Wati, 2023), ide-ide Islamisme mendapatkan kesempatan untuk

diterjemahkan secara lebih luas melalui qanun demi qanun, seperti kompilasi Qanun Jinayah (Tempo.co, 2014) dan Qanun Lembaga Keuangan Syariah (Tempo.co, 2019).

Penerimaan yang lebih luas terhadap ide Islamisme, yang diterjemahkan dalam berbagai varian hukum positif, mengisyaratkan satu hal penting, bahwa masyarakat Aceh sudah dibentuk dengan kesadaran bersama tentang keniscayaan hubungan antara Islam dan negara. Sulit membayangkan ada wacana alternatif lain yang dapat menandingi gagasan Islamisme ini, betapa pun hal tersebut dilakukan. Beberapa gerakan perlawanan sempat hadir di Aceh untuk memberi wacana alternatif, baik dalam aspek kebudayaan, wacana progressif, dan kelompok sipil (Alkaf, 2023b; Idria, 2013; Yayasan Insan Cita Madani, 2007). Formasi dari formalisasi hukum Islam Aceh yang semakin mapan ini akan menjadikan wilayah ini semakin berbeda dengan wilayah lain di Indonesia. Tentunya, hal ini konsekuensi logis dari ekspresi otonomi daerah, yang selama rezim Orde Baru tidak bisa ditampilkan dengan ekspresif. Bahkan, kini, intelektual di perguruan tinggi menjadi tulang punggung bangunan Islamisme di Aceh ini. Hal tersebut dibuktikan dengan sikap defensif yang diperlihatkan ketika formalisasi hukum Islam di Aceh disebut melanggar hak asasi manusia (Abubakar, 2012).

## **Kesimpulan**

Studi ini telah menunjukkan bahwa konstruksi Islamisme di Aceh dibentuk dari penyemaian gagasan modernisme Islam melalui periode yang panjang. Diawali dari periode pembentukan, pencarian makna, dan kontinuitas. Pada periode pembentukan, gagasan Islamisme dikonstruksi dari alam berpikir modern dan imajinasi global, terutama pada gagasan pembaharuan Islam. Pembaharuan Islam yang dialami oleh muslim Indonesia di awal abad ke dua puluh, termasuk di Aceh, hampir selalu mengambil tiga inspirasi dari Muhammad Abduh, Jamaluddin Al Afgani, dan Muhammad bin Abdul Wahab. Ketiga varian ini saling berkelindan, terutama dari pengalaman yang ditunjukkan oleh Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA). PUSA merupakan organisasi modern keagamaan yang menempatkan posisi penting ulama dalam ruang publik Aceh di awal abad ke dua puluh. Sebagai organisasi, PUSA menunjukkan inspirasi kemoderenan yang diambil dari Muhammad Abduh, lalu pandangan politiknya, baik tentang Islamisme lokal dan imajinasi Islamisme global, terinspirasi dari Jamaluddin Al Afghani. Terakhir, purifikasi Islam yang dikampanyekan PUSA datang dari Muhammad bin Abdul Wahab. Periode awal ini menjadi penting untuk melihat periode pembentukan ide Islamisme yang tumbuh di Aceh.

Periode kedua merupakan pencarian makna ketika Aceh memasuki masa kemerdekaan dan penyatuan dengan identitas baru bernama Indonesia. Sebagai negara baru, Indonesia sedang mencari bentuknya. Lalu, Aceh datang dengan membawa ingatannya tentang masa lalu dan cita-cita tentang masa depannya bersama Islam. Harapan tersebut tidak berlangsung dengan baik sehingga terjadi pemberontakan bersenjata. Pemberontakan tersebut lalu menjadi titik anjak persemaian makna tentang bentuk Islamisme yang bisa

tumbuh dalam negara Indonesia yang berbentuk negara nasional. Pada periode ini bisa diperhatikan bahwa upaya Aceh mengkonstruksi gagasan dan praktik Islamisnya tergantung dengan situasi eksternalnya. Namun, hal itu semakin bisa dikendalikan setelah Islamisme Aceh mengalami periode ketiga: kontinuitas. Periode keberlanjutan ini berhubungan dengan dua periode sebelumnya. Lalu, perubahan politik nasional, dengan kejatuhan rezim Orde Baru dan praktik otonomi daerah, semakin memberi peluang kepada Aceh untuk menata imajinasinya tentang Islamisme.

Namun, studi ini terbatas pada penelusuran rentang sejarah dan perhatian terhadap peristiwa-peristiwa besar. Selain itu, penelitian ini memilih sumber kepustakaan terbatas spektrumnya sehingga tidak mampu menjelaskan pemaknaan yang lebih luas lagi. Demikian pula dengan pemilihan unit analisis yang tidak komprehensif, baik pada aspek aktor, peristiwa dan isu. Dengan demikian, Studi ini menyarankan perlunya penelitian lanjutan dengan memperhatikan keterwakilan isu, peristiwa sejarah yang lebih detail, dan aktor latar belakang yang dianggap mampu menjelaskan perkembangan Islamisme di Aceh secara lebih mendalam. Selain itu, perlu diperhatikan keberagaman di wilayah penelitian ini guna menangkap keunikan dari masing-masing wilayah. Dengan cara ini, gambar yang lebih lengkap dan mendalam tentang pertumbuhan, pencarian makna, dan kontinuitas akan lebih komprehensif.

## **Referensi**

- Abdullah, T. (1996). *Islam dan Masyarakat: Pantulan Sejarah Indonesia*. LP3ES.
- Abdullah, T. (2018). *Sekolah & Politik: Pergerakan Kaum Muda di Sumatra Barat 1927-1933*. Suara Muhammadiyah.
- Abubakar, A. (2012). Kontroversi Hukuman Cambuk. *Media Syariah: Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 14(1), 65–96. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22373/jms.v14i1.1719>
- Abubakar, A. Y. (2005). *Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam: Paradigma, Kebijakan, dan Kegiatan*. Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- Alfian, A. (2019). *Partai Persatuan Pembangunan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam 1973-1998*. Universitas Sumatera Utara.
- Alfian, I., & Basri, M. H. (1990). *Perang kolonial Belanda di Aceh: The Dutch colonial war in Aceh*. Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh.
- Ali, F. (1994). *The Revolt of Nation-State Builders: A Comparative Study of the Acehnese Darul Islam and the West Sumatran PRRI Rebellions (1953-1962)*. Melbourne University.
- Ali, F., Monoarfa, S., & Effendy, B. (2008). *Kalla dan Perdamaian Aceh*. Lembaga Studi dan Pengembangan Etika Usaha Indonesia.
- Alkaf, M., Abdullah, I., Qodir, Z., & Jubba, H. (2021). Revisiting the Shariatism Thesis: Islam, Ethno-Nationalisme and the Remaking of Hybrid Identities in Post-Conflict Aceh, Indonesia. *Proceedings of the First*

- International Conference on Democracy and Social Transformation, ICON-DEMOST 2021, September 15, 2021, Semarang, Indonesia.*  
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.4108/eai.15-9-2021.2315574>
- Alkaf, M., Abdullah, I., Qodir, Z., & Jubba, H. (2022). Islamism in Aceh: Genealogy, Shari'atization, and Politics. *Analisa: Journal of Social Science and Religion*, 7(2), 165–182.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.18784/analisa.v7i2.1647>
- Alkaf, M. (2019). Aceh Pasca 2005: Ruang Politik untuk Syariat Islam. In M. Miswari (Ed.), *Islam: Formasilisasi Syariat Islam dan Post- Islamisme di Aceh*. Bandar Publishing.
- Alkaf, M. (2023a). 4 Desember; Datang & Lalu. Komparatif.Id.  
[https://komparatif.id/4-desember-datang-lalu/#google\\_vignette](https://komparatif.id/4-desember-datang-lalu/#google_vignette)
- Alkaf, M. (2023b). *Perlawanan Intelektual Subaltern terhadap Islamisme di Aceh Tahun 2005-2020*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Alkaf, Muhammad. (2024). Runtuhnya “Rumah Besar” Umat Islam. *Serambi Indonesia*, 10.
- Alkaf, & Wati, S. (2023). Pembentukan Demokrasi Lokal di Aceh. *POLITICA; Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam*, 9(2), 58–70.
- Anderson, B. (2016). *Imagined Communities: Reflections of the Origins and Spread of Nationalism*. Verso.
- Aspinall, E. (2007). From Islamism to nationalism in Aceh, Indonesia. *Nations and Nationalism: Journal of The Association for The Study Ethnicity and Nationalism*, 13(2), 245–263. <https://doi.org/10.1111/j.1469-8129.2007.00277.x>
- Aspinall, E. (2009). *Islam and Nation: Separatis Rebellion in Aceh, Indonesia*. Stanford University Press.
- Azra, A. (2002). *Islam Nusantara: Jaringan Global dan Lokal*. Mizan.
- Bertrand, J. (2012). *Nasionalisme dan konflik etnis di Indonesia*. Penerbit Ombak.
- Compton, B. R. (1992). *Kemelut Demokrasi Liberal: Surat-surat Rahasia Boyd R. Compton* (H. Basyaib (ed.)). LP3ES.
- Damanik, A. T. (2010). *Hasan Tiro: Dari Imajinasi Negara Islam Ke Imajinasi Etno-nasionalis*. Friedrich Ebert Stiftung.
- Daudy, A. (2002). *Allah dan Manusia dalam Konsepsi Syekh Nuruddin Ar-Raniry*. Bulan Bintang.
- DetikNews. (2006). *Malik Mahmud: Syariat Islam Bukan Prioritas GAM*. Detik.Com. <https://news.detik.com/berita/d-655788/malik-mahmud-syariat-islam-bukan-prioritas-gam>
- Doel, W. Van Den. (2023). *SNOUCK: Biografi Ilmuwan Christiaan Snouck Hurgronje*. Yayasan Obor Indonesia.
- Fadhli, F., Ichwan, M. N., & Machasin, M. (2024). TAFSIR HIKAYATI AS A RESISTANCE HERMENEUTICS: Hikayat Prang Sabi's Contribution to Holy War Literature and Quranic Studies. *Al Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, 62(01), 35–64.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.14421/ajis.2024.621.19-64>

- Feener, R. M. (2012). Social engineering through Shari'a: Islamic law and state-directed da'wa in contemporary aceh. *Islamic Law and Society*, 19(3), 275–311. <https://doi.org/10.1163/156851911X612581>
- Feith, H., & Castles, L. (1988). Pemikiran politik Indonesia 1945-1965. In *Indonesia*. LP. <https://doi.org/10.2307/3350750>
- Gani, A. (1959). *Aceh dalam Kancah Perjuangan*. Seksi Penerangan Dewan Repolusi.
- Ganie, R. (2021). *Ayah Gani: Ketua Dewan Revolusi DI/TII Aceh*. Bandar Publishing.
- Haris, S. (1991). *Partai persatuan pembangunan dan politik orde baru*. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Hasan, I. (2003). *Namaku Ibrahim Hasan: Menebah Tantangan Zaman*. Yayasan Malem Putra.
- Hasbi, B. (2024). Holy war and the international order Rethinking Acehnese perang sabil in the late 19th century. *Indonesia and the Malay World*, 52(153), 199–220. <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/13639811.2024.2384177>
- Hasjmy, A. (1977). *Apa sebab rakyat Aceh sanggup berperang puluhan tahun melawan agresi Belanda*. Bulan Bintang.
- Hasjmy, A. (1984). *Semangat Merdeka : 70 Tahun Menempuh Jalan Pergolakan & Perjuangan Kemerdekaan*. Bulan Bintang.
- Hasjmy, A. (1995). *Jembatan Selat Malaka*. Yayasan Pendidikan Ali Hasjmy.
- Hussain, A. (1990). *Peristiwa kemerdekaan di Aceh*. Balai Pustaka.
- Ibrahim, M. (1996). *Cut Nyak Din*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI.
- Ibrahimy, M. N. el. (1982). *Teungku Muhammad Daud Beureueh : peranannya dalam pergolakan di Aceh*. Gunung Agung.
- Idria, R. (2013). Cultural Resistance to Shariatism in Aceh. In K. van Dijk & N. J. G. Kaptein (Eds.), *Islam, Politics and Change The Indonesian Experience after the Fall of Suharto* (Issue November 1992). Leiden University Press.
- Ingleson, J. (2018). *Mahasiswa, Nasionalisme & Penjara: Perhimpunan Indonesia 1923-1928*. Komunitas Bambu.
- Irwan, I. (2015). *Nasionalisme Indonesia di Aceh; Persepsi Keindonesiaan Hasan Saleh dan Hasan Tiro, 1945-1970*. Universitas Gajah Mada.
- Ishaq, O. S. (2013). *Aceh pasca konflik kontestasi 3 varian nasionalisme*. Bandar Publishing.
- Joesoef, D. (2006). *Dia dan aku : memoar pencari kebenaran*. Penerbit Buku Kompas.
- Latif, H. (1992). *Persatuan Ulama Selluruh Aceh (PUSA): its Contributions to Educational Reforms in Aceh*. Mc Gill University.
- Latif, Y. (2019). *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas dan Aktualitas*. Gramedia Pustaka Utama.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook*. Sage Publications.

- Missbach, A. (2012). *Politik Jarak Jauh Diaspora Aceh: Suatu Gambaran tentang Konflik Separatis di Indonesia*. Penerbit Ombak.
- Miswari, M. (2018a). *Islamisme dan Etnonasionalisme di Aceh: Satu Perlombaan*. Padebooks.Com.
- Miswari, M. (2018b). *Wahdah Al-Wujud: Konsep Kesatuan Wujud antara Hamba dan Tuhan Menurut Hamzah Fansuri*. Basa Basi.
- Miswari, M. (2022). *Perbandingan Wujudiah Hamzah Fansuri dan Filsafat Mulla Sadra*. Zahir Publishing.
- Morris, E. (1985). Aceh: Revolusi Sosial dan Pandangan Islam. In A. Kahin (Ed.), *Pergolakan Daerah pada Awal Kemerdekaan*. Pustaka Utama Grafiti.
- Morris, E. E. (1983). Islam and Politics in Aceh: a Study of Center-Periphery Relations in Indonesia. *ProQuest Dissertations and Theses*, 337-337 p. <http://search.proquest.com/docview/303144116?accountid=13771>
- Noer, D. (1980). *Gerakan modern Islam di Indonesia 1900-1942*. LP3ES.
- Patria, N. (2008). *Hasan Tiro, Nietzsche, dan Aceh*. Kompas.Com. <https://nasional.kompas.com/read/2008/10/19/02124693/hasan-tiro-nietz?page=all>
- Putuhena, S. (2012). *Historiografi Haji Indonesia*. LKIS.
- Reid, A. (1979). The Blood of the People: revolution and the end of traditional rule in northern sumatra. In *The Blood of the People* (Kuala Lump). Oxford University Press. <https://doi.org/10.2307/j.ctv1qv3jz>
- Reid, A. (2011). *Menuju Sejarah Sumatra: Antara Indonesia dan Dunia*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Remantan, D. (1984). *Pembaharuan Pemikiran Islam di Aceh*. IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Saleh, H. (1992). *Mengapa Aceh Bergejolak*. Gramedia Pustaka Utama.
- Santa, F. (2000). *Politik Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA) dalam Rekonstruksi Negara Islam di Aceh*. IAIN Sunan Kalijaga.
- Schulze, K. (2004). *The Free Aceh Movement (GAM): anatomy of a separatist organization* (Issue 2).
- Sjamsuddin, N. (1990). *Pemberontakan Kaum Republik: Kasus Darul Islam Aceh*. Gratfiti.
- Stolwijk, A. (2021). *Aceh: Kisah Datang dan Terusirnya Belanda dan Jejak yang Ditinggalkan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Sufi, R. (2001). *Sejarah Perkeretaapian di Aceh*. Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional.
- Sukarno, S. (2016). *Di Bawah Bendera Revolusi Jilid 1*. Banana Books.
- Tempo.co. (2003). *Masyarakat Aceh Antusias Sambut Syariat Islam*. Tempo.Co. <https://nasional.tempo.co/read/182/masyarakat-aceh-antusias-sambut-syariat-islam>
- Tempo.co. (2014). *Qanun Jinayat Aceh Disahkan*. <https://nasional.tempo.co/read/610081/qanun-jinayat-aceh-disahkan/full&view=ok>
- Tempo.co. (2019). *Qanun Lembaga Keuangan Syariah untuk Memajukan*



- Ekonomi Aceh.* <https://nasional.tempo.co/read/1251653/qanun-lembaga-keuangan-syariah-untuk-memajukan-ekonomi-aceh>
- Tiro, A. W. U. (1972). *Peranan Teungku-Teungku di Tiro dalam Perang Aceh.*
- Tiro, T. H. di. (1986). *Perkara dan Alasan Perdjuangan Angkatan Atjeh Sumatera Merdeka.* Angkatan Atjeh Sumatera Merdeka.
- Tiro, T. H. M. di. (1968). *Atjeh Bak Mata Donja.* Institute Aceh di Amerika.
- Umar, M. (2015). *Mengadu Nasib di Kebun Karet: Kehidupan Buruh Onderneming Karet di Aceh Timur, 1907-1939.* Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh.
- Velve, J. J. Van De. (1987). *Surat-Surat Dari Sumatra 1928-1949.* Pustaka Azet.
- Yayasan Insan Cita Madani. (2007). *Profil Ringkas Yayasan Insan Cita Madani (YICM).* [Http://Yayasaninsancitamadani.Blogspot.Com/](http://Yayasaninsancitamadani.Blogspot.Com/).